

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam suatu organisasi, baik swasta maupun publik, kepemimpinan merupakan elemen fundamental yang menentukan arah, strategi, serta keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan. Kepemimpinan yang efektif menjadi faktor kunci dalam menggerakkan sumber daya yang ada, menciptakan sinergi antar unit kerja, dan membentuk budaya organisasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini berlaku secara khusus dalam sektor publik, di mana pemimpin tidak hanya bertugas untuk mengelola administrasi, tetapi juga dituntut mampu menjadi agen perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pemerintahan daerah, terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab dan wewenang pemerintah lokal menjadi semakin besar. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya, merancang program pembangunan, serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keberhasilan dari setiap program yang dirancang sangat bergantung pada bagaimana aparatur pemerintah, khususnya para pemimpinnya, mampu menjalankan peran strategis secara efektif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Efektivitas program pemerintah mencerminkan sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi output,

outcome, maupun dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Menurut Mahsun (2006), efektivitas dalam sektor publik harus dilihat dari ketercapaian hasil yang sesuai dengan rencana, serta manfaatnya bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, kepemimpinan berfungsi sebagai penggerak utama yang mengintegrasikan antara kebijakan, pelaksana, dan partisipasi masyarakat agar seluruh proses program berjalan dengan baik. Pemimpin yang mampu menjalin komunikasi efektif, membangun sinergi antar instansi, serta menggerakkan aparatur secara partisipatif akan lebih berpeluang dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program.

Kecamatan Mandrehe Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, wilayah ini memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dioptimalkan dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Berbagai program pemerintah yang telah dicanangkan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, sering kali tidak memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam aspek implementasi kebijakan dan pengelolaan program secara efektif.

Adapun beberapa program pemerintah yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mandrehe Utara antara lain mencakup program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan saluran irigasi, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan dan

pendidikan, serta upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, terdapat pula program-program lintas sektor seperti pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas.

Hasil observasi awal di lapangan serta laporan kinerja kecamatan menunjukkan bahwa beberapa program strategis, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antarunit pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan.

Selain itu, pelaksanaan program pemerintah di tingkat kecamatan juga kerap kali terkendala oleh mekanisme birokrasi yang lamban dan kurang fleksibel. Struktur organisasi yang masih bersifat hierarkis, ditambah dengan kurangnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, menyebabkan proses implementasi program berjalan tidak optimal. Dalam beberapa kasus, program yang direncanakan di tingkat kabupaten tidak sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di Kecamatan Mandrehe Utara, sehingga berdampak pada rendahnya relevansi dan keberlanjutan program tersebut di lapangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah di Kecamatan Mandrehe

Utara. Dalam konteks ini, peran pemimpin di tingkat kecamatan, khususnya camat, menjadi sangat strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Camat tidak hanya bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai koordinator dan motor penggerak yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program di wilayah kerjanya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu program tidak dapat hanya bertumpu pada ketersediaan anggaran dan kebijakan, tetapi juga sangat tergantung pada sejauh mana pemimpin mampu mengelola dinamika organisasi dan menjalin hubungan kerja yang produktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang visioner akan mampu menavigasi kompleksitas birokrasi dan menjadikan sumber daya yang tersedia sebagai kekuatan dalam mencapai hasil yang maksimal (Bass & Riggio, 2006).

Di tingkat kecamatan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan peran tersebut, camat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun strategi implementasi kebijakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksana program, serta menjadi fasilitator dalam membangun partisipasi masyarakat. Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan program (Yukl, 2013).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan yang baik secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi publik, terutama dalam konteks pelaksanaan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepemimpinan bukan sekadar posisi struktural, tetapi merupakan suatu proses dinamis yang menuntut kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan melihat kompleksitas kondisi nyata yang dihadapi oleh Kecamatan Mandrehe Utara, maka diperlukan pendekatan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif dalam mengelola dinamika program-program pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian ilmiah yang dituangkan dalam penelitian berjudul: **“Analisis Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat”**

1.2 FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada Peran Kepemimpinan Pada Kantor Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat dalam upaya meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah. Penelitian ini tidak hanya melihat strategi secara teoritis, tetapi lebih menekankan praktik nyata di

lapangan, yaitu bagaimana Peran Kepemimpinan dan sejauh mana efektivitasnya program pemerintah di tingkat kecamatan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepemimpinan di Kantor Kecamatan Mandrehe Utara dalam mengimplementasikan program-program pemerintah?
2. Sejauh mana kepemimpinan camat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program-program pemerintah di wilayah tersebut?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam peningkatan efektivitas program-program pemerintah Kecamatan Mandrehe Utara?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran kepemimpinan di Kantor Kecamatan Mandrehe Utara dalam pelaksanaan program pemerintah.
2. Mengkaji kontribusi kepemimpinan camat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah di Kecamatan Mandrehe Utara.
3. Menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan efektivitas program-program pemerintah kecamatan.

1. 5 MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan dan efektivitas program pemerintah pada level pemerintahan daerah, khususnya kecamatan.
2. Memperkuat teori-teori kepemimpinan seperti teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan partisipatif dalam konteks implementasi kebijakan publik.
3. Menjadi referensi akademik untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan studi kepemimpinan dalam organisasi sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat: Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan kepemimpinan di tingkat kecamatan agar lebih responsif dan efektif dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
2. Bagi Camat dan Aparatur Kecamatan Mandrehe Utara: Memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas program pemerintah, serta mendorong perbaikan dalam strategi kepemimpinan dan koordinasi antarunit kerja.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran penting kepemimpinan dalam pelayanan publik dan

pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah.

4. Bagi Peneliti Lain: Menjadi dasar atau acuan dalam melakukan kajian lanjutan yang sejenis, baik dengan pendekatan yang sama maupun pengembangan variabel lain dalam ruang lingkup tata kelola pemerintahan.